

Siaran Pers

FORUM IRIGASI INDONESIA 2018: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA AIR, PANGAN, DAN ENERGI YANG KOMPETITIF

Jakarta, 30 Oktober 2018 – “Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pencapaian ketahanan air, pangan, dan energi merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Namun, pencapaian tersebut terkendala akibat kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya yang tidak optimal, kurangnya koordinasi, serta tumpang tindih kewenangan antar sektor dan tingkatan, disinyalir menjadi faktor penyebab lain kurang efektifnya pencapaian target ketahanan air, pangan, dan energi di Indonesia,” jelas Deputy Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata dalam sambutannya sekaligus membuka **Forum Irigasi Indonesia (FII) 2018** dengan tema *Development for Water, Food, and Energy Security in Competitive Environment* yang akan diselenggarakan pada 30-31 Oktober 2018 di Sasono Mulyo Ballroom Hotel Le Meridien, Jakarta.

FII 2018 bertujuan untuk: (1) berbagi informasi dan pengetahuan bagi para pelaku irigasi di Indonesia, sehingga menjadi pembelajaran bersama dalam mengembangkan dan mengelola irigasi kedepan; (2) mendiskusikan praktek terbaik dan pembelajaran terkait kegiatan pertanian dan keirigasian yang dilakukan pemerintah, perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat/NGO; (3) mengkonsolidasi pemikiran strategis untuk menjawab tantangan yang ada, sehingga mampu melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan dan energi terbarukan secara berkelanjutan; serta (4) memformulasikan revitalisasi dan modernisasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. FII 2018 ini juga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pertemuan *3rd World Irrigation Forum* oleh Komite Nasional Indonesia – *International Commission on Irrigation and Drainage* (KNI-ICID) pada September 2019 di Indonesia.

Lebih lanjut, Deputy Wismana menjelaskan tantangan utama pengelolaan sumber daya air di Indonesia adalah semakin tingginya permintaan air namun dengan suplai yang relatif tetap, dan bahkan dalam beberapa kasus cenderung menurun. Artinya, kompetisi akan air semakin tinggi, sementara kebutuhan akan air bersifat mutlak dan tidak bisa ditunda. Untuk itu, perlu diatur sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan akan air semua pihak, karena kegagalan atau penundaan memenuhi kebutuhan air hanya akan menimbulkan masalah lain yang lebih besar.

“Diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang intensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan sumber daya air. Keterhubungan antara air, pangan, dan energi (*water-food-energy nexus*) merupakan pendekatan yang harus digunakan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan mengkolaborasi antara air, pangan, dan energi. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, juga perlu disiapkan langkah strategis yang menjawab tantangan besar tersebut untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Kami juga berharap FII ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan *background study* RPJMN 2020 -2024 terkait pengembangan dan pengelolaan irigasi,” jelas beliau.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama dua hari dengan metode pleno dan tiga *parallel working groups*, kemudian ditutup oleh Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris. Turut hadir peserta undangan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian KLH, Kemendes PDTT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BMKG, pemerintah daerah, BUMN seperti PT Telkom, pihak swasta, perguruan tinggi, peneliti, pakar irigasi dari INACID dan World Bank, NGO/CSO, bank tani, kelompok tani, serta *founder startup* pertanian.

Jakarta, 30 Oktober 2018

Parulian Silalahi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id